

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Presiden memiliki peran utama dalam mengambil keputusan dalam rangka menentukan arah kebijakan yang akan di ambil dan hubungan internasional antar negara. Gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang di ambil dari seorang presiden dapat memiliki pengaruh terhadap stabilitas pada negara tersebut dan juga dapat mempengaruhi reputasi global serta pandangan negara lain terhadap negara tersebut. Kepemimpinan yang baik sendiri tidak semata mata di tunjukan dengan kemampuan seorang pemimpin dalam merespon atau mengatasi permasalahan yang ada pada suatu negara saja, namun juga pada pengambilan Keputusan dalam menjalin hubungan baik dengan aktor aktor global. Presiden sendiri memiliki suatu kewenangan yang bertujuan untuk dapat memutuskan aliansi strategis dan juga untuk dapat menetapkan prioritas kepentingan negara dalam kebijakan luar negri serta untuk dapat memberikan respon tekanan Internasional¹.

Rodrigo Roa Duterte atau yang kerap di kenal sebagai Duterte merupakan presiden Filipina ke-16, menggantikan Benigno Aquino II yang sebelumnya menjabat dari tahun 2010 hingga pada tahun 2016. Rodrigo Duterte sendiri di kenal sebagai pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan yang memiliki beberapa

¹ Sudirman, “Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan Dan Hubungan Presiden Dengan Lembaga Negara Yang Lain Dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945),” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya* 1, no. 1 (2013): 1–27, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/526>.

kontroversi serta mendapat beberapa respon kecaman dari berbagai pihak termasuk warga negaranya sendiri dan bahkan mendapatkan kecaman dari pihak luar². Kepemimpinan Rodrigo Duterte sendiri di kenal sebagai salah satu sosok yang tegas. Salah satu kebijakan yang menunjukkan ketegasan Rodrigo Duterte dan keseriusanya dalam menangani isu nasional pada saat itu yakni di bentuknya kebijakan *War On Drugs*.

Kebijakan *War On Drugs* sendiri di Dasari oleh *Project Double Barrel* melalui *Command Memorandum Circular No. 16-2016*, project ini berjalan dengan menggunakan pendekatan dua arah atau sesuai dengan Namanya yakni “*Double Barrel*” yang mencerminkan penindakan terhadap pelaku penyaahgunaan narkotika dalam berbagai tingkatan. Dua tingkatan tersebut yakni *Project Tokhang* yang cenderung bergerak di tingkatan bawah seperti komunitas kecil dan individu individu yang terindikasi atau yang di duga melakukan segala bentuk penyalahgunaan narkotika. Kemudian untuk tingkatan selanjutnya di sebut *High - Value Targets* yang memfokuskan operasi dalam penindakan tokoh tokoh besar dalam jaringan peredaran narkotika. Dalam *Command Memorandum Circular No. 16-2016* sendiri di sebutkan bahwa penindakan yang di lakukan harus sesuai prosedur penangkapan yang ada yakni tidak menggunakan kekerasan atau tindakan represif³. Kebijakan “*War On Drugs*“ merupakan salah satu janji dari masa

² RMHSS Bintoro, “Analisis Kepemimpinan Rodrigo Duterte Dalam Memimpin Negara Filipina,” *Researchgate.Net*, no. June (2022), https://www.researchgate.net/profile/Rm-Hafizh-Swardana/publication/361501707_ANALISIS_KEPEMIMPINAN_RODRIGO_DUTERTE_DALAM_MEMIMPIN_NEGARA_FILIPINA/links/62b55d99dc817901fc773c59/ANALISIS-KEPEMIMPINAN-RODRIGO-DUTERTE-DALAM-MEMIMPIN-NEGARA-FILIPINA.pdf.

³ Vanda Brown, “The Human Rights Consequences of the *War On Drugs* in the Philippines,” Brookings, 2017, <https://www.hrw.org/news/2017/07/20/human-rights-consequences-war-drugs-philippines>.

kampanye yang di lakukan Rodrigo Duterte untuk memerangi narkoba yang mulai mewabah di Filipina. Menurut Duterte Melalui kebijakan *War On Drugs* yang menggunakan pendekatan yang cenderung lebih keras memiliki probabilitas keberhasilan yang lebih tinggi, hal ini di nyatakan oleh Duterte menurut pengalamannya saat memimpin menjadi walikota di Kota Davo. Rodrigo Duterte menunjukkan bahwa dia tidak main main dalam merespon isu narkoba yang ada di Filipina. Setelah terpilih menjadi presiden Filipina ke-16, Duterte segera mengesahkan Kebijakan *War On Drugs* yang di Dasari oleh Project *Double Barrel* melalui *Command Memorandum Circular No. 16-2016*⁴.

Dalam implementasi kebijakan *War On Drugs* Rodrigo Duterte mendapat kecaman dan kritik dari berbagai pihak. Duterte terang terangan mengatakan pada pers "*You are free to kill the idiots*"⁵, kata kata ini yang kemudian merujuk kepada para kartel dan penyalahguna narkoba, Duterte memperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap kartel dan para pengedar narkoba, pada implementasinya Amnesty Internasional sampai mengecam keputusan Duterte ini, lantaran sebelum 100 hari kepemimpinan Duterte lebih dari 3000 korban jiwa yang berjatuhan⁶.

Beberapa aktor seperti *Human Right Watch* melalui pernyataan Tom Lantos selaku perwakilan dari *Human Right Watch* menyatakan bahwa menyayangkan tindak represif yang di lakukan aparat dan banyak terjadi tindak pelanggaran

⁴ Ibid.

⁵ Vasudevan Sridharan, "Philippine President Rodrigo Duterte Orders Police to Shoot Dead 'idiots' If They Resist Arrest | IBTimes UK," 2017, <https://www.ibtimes.co.uk/philippine-president-rodrigo-duterte-orders-police-shoot-dead-idiots-if-they-resist-arrest-1636901>.

⁶ Fivi Fajar, Iryana Dan, and Handojo Leksono, "ANALISIS KEBIJAKAN PRESIDEN DUTERTE MELAKUKAN EXTRAJUDICIAL KILLING DALAM MEMBERANTAS NARKOBA DI FILIPINA BERDASARKAN STATUTA ROMA 1998," *Belli Ac Pacis*, vol. 4, 2018, <https://www.ddb>.

HAM⁷. Kemudian PBB juga menyampaikan kritik melalui *Special Rapporteur PBB* Agnes Callamard dalam kunjungan mendadak ke Manila pada Mei 2017 dan memberikan pernyataan akan sikap PBB terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Filipina, dan Uni Eropa melalui *European Parliament Votes Urgency Resolution on the Philippines* pada 15 September 2016 yang menyatakan bahwa telah terbukti melakukan *extrajudicial killing* dengan melakukan pembunuhan oleh pembunuh bayaran dan tindak represif dari aparat kepolisian dan dengan adanya bukti bahwa kebijakan *War On Drugs* mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang ada⁸.

Sebagai salah satu organisasi yang menjunjung tinggi keadilan HAM Uni Eropa melayangkan kritik terhadap kebijakan tersebut dengan maksud untuk mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus mengedepankan Hak Asasi Manusia. Atas kritik yang di berikan pada Duterte oleh Uni Eropa, Duterte memberikan respon yang cukup keras kepada Uni Eropa dan mengatakan bahwa permasalahan nasional suatu negara hanya bisa di atasi oleh negara itu sendiri. Dengan kata lain Duterte tak mengindahkan himbauan tersebut, kemudian ia mengacungkan jari Tengah kepada pers sebagai tanda ketidakpeduliannya terhadap media yang sedang mengkritiknya⁹.

Setelah selesai dengan responnya terhadap kritik Uni Eropa pada suatu pidato di kota Davao yang memberikan respon kasar dan tidak diplomatis tersebut, Duterte

⁷ FIDH, "European Parliament Votes Urgency Resolution on the Philippines.," European Parliament votes urgency resolution on the Philippines., 2016, https://www.fidh.org/en/international-advocacy/european-union/european-parliament-votes-urgency-resolution-on-the-philippines?utm_source.

⁸ Ibid.

⁹ Fajar, Dan, and Leksono, "ANALISIS KEBIJAKAN PRESIDEN DUTERTE MELAKUKAN EXTRAJUDICIAL KILLING DALAM MEMBERANTAS NARKOBA DI FILIPINA BERDASARKAN STATUTA ROMA 1998."

seakan tidak takut dan tidak menyesali melakukan hal tersebut. Ketika Uni Eropa memberikan dana berupa uang untuk bantuan kemanusiaan dan memberikan ancaman pemutusan kerja sama atas bentuk kritik dari kebijakan *War On Drugs tersebut*, Duterte seakan tidak peduli dengan bantuan dan ancaman tersebut, Duterte mengatakan bahwa ia tak akan tunduk dengan kolonialisme modern yang dilakukan oleh Uni Eropa¹⁰.

Sikap nasionalis yang dimiliki Rodrigo Duterte terlalu kuat dan bahkan Duterte menyebutkan bahwa Uni Eropa hanya ikut campur urusan nasional negara lain. Duterte benar-benar tidak ingin tunduk oleh Uni Eropa meskipun dengan alasan dan tujuan yang baik. Duterte tetap melanjutkan kebijakan *War On Drugs* yang seakan akan mengejek Uni Eropa bahwa hanya Duterte yang berhak untuk tetap melanjutkan atau menghentikan suatu kebijakan¹¹.

Dari pemaparan tersebut terbukti bahwa Duterte merupakan orang yang memiliki sikap keras, dan cenderung tidak suka menerima kritik, hal ini tercermin pada respon keras yang diberikan Duterte dalam pidato yang menanggapi kritik Uni Eropa atas kebijakan *War On Drugs*. Atas dasar pemaparan tersebut penelitian ini akan menyoroti lebih jauh bagaimana sikap Rodrigo Duterte yang keras dan tidak diplomatis terhadap kritik Uni Eropa atas kebijakan *War On Drugs* yang dapat terbentuk.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Vasudevan Sridharan, "Philippine President Rodrigo Duterte Orders Police to Shoot Dead 'idiots' If They Resist Arrest | IBTimes UK."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka di dapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni “ *Bagaimana Respon Rodrigo Roa Duterte terhadap kritik Uni Eropa atas kebijakan War On Drugs di Filipina ?* ”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang di inginkan penulis dalam penelitian ini ialah dapat mengetahui Bagaimana Respon kepemimpinan Rodrigo Duterte dapat berdampak pada hubungan Filipina dan Uni Eropa

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Secara Akademis

Pada penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan mengenai Hubungan Internasional, terkhusus pada pembahasan mengenai pentingnya karakteristik pemimpin pada suatu negara dapat mempengaruhi hubungan antar negara

1.3.2.2 Manfaat Secara Praktis

Penulis mengharapkan bahwa tulisan ini nantinya akan memiliki manfaat bagi para pembaca serta menambah ilmu bagi pembaca dan penulis juga berharap nantinya penelitian ini akan menjadi rujukan atau referensi bagi para peneliti peneliti mendatang

1.4 Peneliti Terdahulu

Peneliti pertama dalam Jurnal "*Bloodied Democracy: Duterte and the Death of Liberal Reformism in the Philippines*" oleh **Mark R. Thompson**¹². membahas gaya kepemimpinan Rodrigo Duterte yang sangat keras dan berpengaruh besar terhadap perubahan politik di Filipina. Duterte dikenal dengan pendekatan keras dan populis, terutama dalam kampanye anti-narkoba yang brutal dan kontroversial, yang melibatkan banyak pembunuhan di luar proses hukum. Sikap uniknya yang otoriter, pragmatis, dan agresif dalam retorika serta tindakan politiknya memungkinkan Duterte memanfaatkan kelemahan institusi demokrasi Filipina untuk memperkuat kekuasaannya secara personalistik. Ia membangun koalisi baru dengan aparat keamanan dan kelompok strategis lain seperti sayap komunis, sekaligus mengabaikan norma demokrasi dan supremasi hukum yang selama ini menjadi fondasi pemerintahan liberal sebelumnya. Dengan demikian, Duterte berhasil menggeser tatanan politik Filipina dari reformisme liberal menuju rezim populis illiberal yang menekankan kekuasaan kuat dan penggunaan kekerasan sebagai alat pemerintahan. Sikap idiosinkratik Duterte ini tercermin dalam pengambilan keputusan yang kontroversial dan tidak konvensional, seperti mengesampingkan mekanisme checks and balances, menolak kritik internasional, serta menghidupkan kembali institusi militeristik yang pernah digunakan pada masa otoriter Marcos. Hal ini menunjukkan bagaimana karakter dan gaya kepemimpinan yang unik dapat secara langsung mempengaruhi kebijakan negara dan arah politik

¹² Mark R. Thompson, "Bloodied Democracy: Duterte and the Death of Liberal Reformism in the Philippines," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 35, no. 3 (2016): 39–68, <https://doi.org/10.1177/186810341603500303>.

nasional, menciptakan perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan norma politik Filipina.

Peneliti kedua dengan judul **“Strategi *Framing* Duterte terhadap kebijakan *War On Drugs* tahun 2016-2022”** oleh **Muhammad Hafizh Qhoreiq Al Asy’ Ari**

¹³. Dalam Jurnal ini membahas bagaimana Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menggunakan strategi framing dalam pelaksanaan kebijakan *War On Drugs* pada periode 2016-2022. Duterte memanfaatkan komunikasi politik dan media untuk membentuk opini publik agar mendukung kebijakan yang kontroversial tersebut. Kebijakan ini menekankan operasi keras terhadap narkoba dan kriminalitas, yang meskipun menurunkan angka kejahatan dan meningkatkan rasa aman sebagian masyarakat, juga menuai kritik terkait pelanggaran hak asasi manusia, termasuk tindakan *extrajudicial killings*. Duterte menolak investigasi dari International Criminal Court (ICC) dan bahkan memutuskan keluar dari ICC agar kebijakan ini tetap berjalan tanpa intervensi internasional. Strategi framing yang diterapkan Duterte berfokus pada menonjolkan sisi positif kebijakan, seperti penurunan sindikat narkoba dan kriminalitas, serta menepis pemberitaan negatif yang beredar di masyarakat dan internasional. Sikap idiosinkratik Duterte sangat memengaruhi pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan *War On Drugs*. Karakter pribadinya yang otoriter, tegas, dan nasionalis tinggi membuatnya bersikap keras dan tidak kompromi terhadap kritik, terutama terkait isu HAM. Sikap ini tercermin dalam pemberian wewenang penuh kepada aparat kepolisian untuk menjalankan

¹³ Muhammad Hafizh Qhoreiq Al Asy’ari, “Strategi Framing Duterte Terhadap Kebijakan *War On Drugs* Tahun 2016 - 2022,” 2024, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/51014>.

operasi secara agresif dan penolakan terhadap intervensi ICC. Duterte juga menggunakan framing untuk membangun citra dirinya sebagai pemimpin yang berani dan berkomitmen melawan narkoba demi kepentingan nasional, meskipun harus menghadapi kritik dan tekanan internasional. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana nilai dan kepercayaan pribadi Duterte memengaruhi kebijakan yang diambil, dengan menempatkan prioritas pada keamanan dan kedaulatan negara di atas segala hal lain.

Peneliti ketiga dengan judul “ *The Persistence of Ethnopolit Support : the Case of Rodrigo Duterte’s Philippines* “ oleh Dean Dually¹⁴. Jurnal ini membahas fenomena dukungan yang kuat dan stabil terhadap Presiden Filipina Rodrigo Duterte dengan fokus pada konsep etnopolitisme, yaitu perpaduan antara retorika populis dan identitas etnis. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan Duterte sangat dipengaruhi oleh identitas etnis non-Tagalog, khususnya suku Bisaya dari Mindanao dan Visayas, yang merasa terwakili oleh Duterte melalui penggunaan bahasa dan simbol etnisnya. Faktor identitas etnis ini terbukti lebih dominan dalam menjelaskan dukungan dibandingkan faktor lain seperti usia, pendidikan, atau kelas sosial. Sikap idiosinkratik Duterte yang khas, termasuk gaya populis yang blak-blakan dan anti-elit serta penekanan pada identitas etnisnya, tercermin dalam kebijakan dan pengambilan keputusan yang diambilnya, terutama dalam kebijakan kontroversial seperti perang melawan narkoba (*War On Drugs*). Sikap unik ini menyebabkan Duterte mengambil kebijakan yang tidak hanya didasarkan pada

¹⁴ Dean Dually, Allen Hicken, and Ronald Holmes, “The Persistence of Ethnopolit Support: The Case of Rodrigo Duterte’s Philippines,” *Journal of East Asian Studies* 22, no. 3 (2022): 525–53, <https://doi.org/10.1017/jea.2022.29>.

pertimbangan teknokratis, tetapi juga dipengaruhi oleh loyalitas etnis dan basis dukungan yang kuat, sehingga kebijakan tersebut tetap dipertahankan meskipun mendapat kritik tajam, seperti fokus pada penindakan terhadap pengguna dan pengedar kecil sementara pelaku besar sering lolos dari jeratan hukum. Dengan demikian, karakter idiosinkratik Duterte yang berakar pada identitas etnis dan gaya populisnya memengaruhi arah dan isi kebijakan *War On Drugs* yang diambilnya, memperlihatkan bagaimana etnopopulisme menjadi kunci dalam memahami dukungan dan kebijakan Duterte.

Peneliti keempat dengan judul “**Faktor Idiosinkratik Rodrigo Duterte dalam Kebijakan Keluarnya Filipina dari *International Criminal Court* “ oleh Mochamad Agung Perkasa¹⁵. Jurnal ini membahas bagaimana faktor idiosinkratik Presiden Rodrigo Duterte, yang meliputi sifat ekspansionis, nasionalisme tinggi, kepercayaan diri yang kuat, serta sikap keras dan pragmatis, sangat mempengaruhi kebijakan Filipina, khususnya dalam konteks kebijakan *War On Drugs* dan keputusan Filipina keluar dari *International Criminal Court* (ICC). Duterte dikenal sebagai pemimpin yang tidak mudah diganggu dan mengambil keputusan secara tegas dengan pendekatan “*do or die*”, yang tercermin dalam pelaksanaan kebijakan *War On Drugs* yang sangat keras dan kontroversial, menimbulkan ribuan korban jiwa dan kecaman dari komunitas internasional sebagai pelanggaran hak asasi manusia. ICC kemudian mulai menyelidiki kebijakan ini dan menilai Duterte sebagai aktor utama di balik kebijakan tersebut,**

¹⁵ Mochamad Agung Perkasa, “Faktor Idiosinkratik Rodrigo Duterte Dalam Kebijakan Keluarnya Filipina Dari International Criminal Court (Icc),” *Hubungan Internasional Fisip Universitas Komputer Indonesia*, no. Icc (2019): 1–12, https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1928/13/UNIKOM_Mochamad_Agung_Perkasa_Jurnal.pdf/.

bahkan menuduhnya melakukan kejahatan kemanusiaan, yang memicu Duterte mengancam dan akhirnya memutuskan Filipina keluar dari ICC pada 2018 sebagai bentuk penolakan terhadap campur tangan internasional yang dianggap mengancam kedaulatan negara. Sikap idiosinkratik Duterte yang memiliki ketidakpercayaan tinggi terhadap yurisdiksi ICC dan keinginan kuat untuk mempertahankan kedaulatan nasional membuatnya tetap teguh menghadapi tekanan internasional dan kritik domestik, meskipun terdapat perpecahan pendapat di masyarakat Filipina antara pendukung dan penentang kebijakan tersebut. Dengan demikian, jurnal ini menegaskan bahwa karakter dan kepribadian unik Duterte sangat menentukan arah kebijakan nasional dan luar negeri Filipina, khususnya dalam perang melawan narkoba dan hubungan dengan lembaga internasional seperti ICC, yang menunjukkan bagaimana faktor idiosinkratik seorang pemimpin dapat berdampak besar pada pengambilan keputusan politik dan kebijakan negara.

Peneliti kelima dengan judul “ *Understanding Duterteismo: Populism and Democratic Politics in the Philippines* “ oleh Ian Clark R Parcon¹⁶ .Jurnal ini membahas fenomena politik Filipina di bawah kepemimpinan Rodrigo Duterte yang dikenal dengan istilah "*Duterteismo*," sebuah gaya pemerintahan populis yang menandai pergeseran signifikan dari tatanan liberal demokrasi yang selama ini dominan. Duterte dipandang sebagai figur otoriter dan personalistik yang mengandalkan kepercayaan publik terhadap kemampuannya sebagai pemimpin yang tegas dan siap mengambil tindakan drastis untuk menyelesaikan masalah

¹⁶ Ian Clark R. Parcon, “Understanding Duterteismo: Populism and Democratic Politics in the Philippines,” *Asian Journal of Social Science* 49, no. 3 (2021): 131–37, <https://doi.org/10.1016/j.ajss.2021.03.001>.

bangsa, terutama dalam kebijakan kontroversialnya yaitu perang melawan narkoba (*War On Drugs*). Sikap idiosinkratik Duterte yang keras, konfrontatif, dan populis sangat mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan ini, di mana ia menempatkan konflik dan kekuasaan sebagai elemen utama politik, mengabaikan prosedur deliberatif yang mengedepankan dialog dan konsensus. Pendekatan Duterte dalam perang melawan narkoba bukan hanya sebagai respons terhadap masalah kriminalitas, tetapi juga sebagai reaksi terhadap apa yang disebut sebagai "*objective violence*" atau kekerasan struktural dan elitisme kolonial yang telah lama merongrong demokrasi Filipina, sehingga kebijakan ini menjadi simbol perjuangan melawan sistem yang dianggap korup dan eksklusif. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan kritik internasional karena pendekatannya yang brutal dan tidak kompromis. Duterte memanfaatkan ketidakpuasan publik terhadap elit politik yang dianggap gagal dan tidak responsif, sehingga ia memperoleh legitimasi populis dengan menawarkan harapan bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Dalam konteks ini, sikap idiosinkratik Duterte yang mengedepankan tindakan cepat dan tegas, serta gaya kepemimpinan yang otoriter dan personalistik, menjadi faktor utama yang membentuk kebijakan *War On Drugs*, sekaligus mencerminkan dinamika politik Filipina yang kompleks di mana norma demokrasi dan institusi negara diuji oleh gaya kepemimpinan yang mengutamakan kekuasaan dan konflik daripada konsensus dan deliberasi.

Peneliti keenam dengan judul “ *Two Faces of Duterte: Two Visions of Democracy in the Philippines*” oleh **Benjiemen A. Labastin** ¹⁷. Jurnal ini membahas bagaimana sikap idiosinkratik Rodrigo Duterte, yang ditandai dengan gaya kepemimpinan otoriter dan retorika emosional yang kuat, sangat mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan, khususnya dalam kebijakan *War On Drugs*. Sikap Duterte yang radikal dan berani mengambil tindakan keras merupakan manifestasi dari apa yang disebut sebagai “*radical politics*,” yaitu pengakuan terhadap konflik sosial yang permanen dan penolakan terhadap konsensus sempurna dalam demokrasi, sehingga ia menggunakan ketegangan sosial antara pusat dan pinggiran sebagai momentum politiknya untuk mendapatkan dukungan rakyat. Pendekatan populis Duterte yang menekankan keadilan sosial dan identitas regional ini sekaligus memecah belah dan menggalang dukungan massa, yang membuat kebijakan *War On Drugs* mendapat legitimasi dari sebagian besar masyarakat meskipun kontroversial. Namun, gaya kepemimpinan ini juga mengandung risiko otoritarianisme, di mana Duterte menggunakan kekuasaan negara secara represif untuk menekan kritik dan oposisi, serta mengintimidasi lawan politiknya, yang menurut beberapa pengamat seperti Randy David, mengubah politik menjadi sebuah “*teater*” yang mengandalkan retorika dan intimidasi daripada program rasional dan demokratis. Dengan demikian, sikap idiosinkratik Duterte yang menggabungkan keberanian mengambil tindakan keras, retorika populis, dan penolakan terhadap elit tradisional secara langsung

¹⁷ Benjiemen A Labastin, “Two Faces of Duterte: Two Visions of Democracy in the Philippines,” *Social Ethics Society Journal of Applied Philosophy Special Issue*, no. December (2018): 31–54, <https://opinion.inquirer.net/94752/a-mayor-for-a-nation-of->.

mempengaruhi kebijakan *War On Drugs* dengan menonjolkan pendekatan represif dan otoriter, yang sekaligus mencerminkan ketegangan antara aspirasi perubahan sosial dan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi di Filipina.

Peneliti ketujuh dengan judul “ *Political constructions of people who use drugs in the Philippines: A qualitative content analysis*” Oleh Gideon Lasco¹⁸. Jurnal ini membahas bagaimana pemerintah Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte membingkai dan menggambarkan orang-orang yang menggunakan narkoba dalam dokumen kebijakan resmi selama masa jabatannya (2016-2022), dengan fokus pada bagaimana narasi tersebut memperkuat pendekatan hukuman yang keras dan represif dalam kebijakan "*War On Drugs*". Dalam konteks sikap idiosinkratik Duterte, jurnal ini menegaskan bahwa pandangan pribadi Duterte yang sangat keras, intoleran, dan penuh moral panic terhadap narkoba sangat mempengaruhi cara pemerintah memandang dan memperlakukan pengguna narkoba, yang secara konsisten diposisikan sebagai ancaman kriminal yang harus diberantas tanpa mempertimbangkan hak asasi manusia atau agensi individu. Sikap idiosinkratik Duterte tercermin dalam penggunaan bahasa yang stigmatisasi dan kriminalisasi dalam dokumen resmi, yang kemudian mendorong pengambilan keputusan kebijakan yang menekankan tindakan ekstrapudisial dan penindakan keras, mengabaikan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan rehabilitasi yang lebih manusiawi. Dengan kata lain, sikap pribadi Duterte yang keras dan penuh moral panic membentuk kerangka kebijakan

¹⁸ Gideon Lasco, “Political Constructions of People Who Use Drugs in the Philippines: A Qualitative Content Analysis,” *International Journal of Drug Policy* 130, no. July (2024): 104518, <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2024.104518>.

yang represif dan punitif, yang menempatkan pengguna narkoba sebagai musuh masyarakat yang harus diberantas secara agresif, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mengedepankan kriminalisasi dan kekerasan daripada perlindungan hak dan pendekatan yang lebih progresif. Hal ini menunjukkan bagaimana sikap idiosinkratik seorang pemimpin dapat secara langsung mempengaruhi arah dan karakter kebijakan publik, khususnya dalam konteks kebijakan narkoba di Filipina selama masa Duterte.

Peneliti Kedelapan dengan judul “ **Analisis Model Idiosinkratik Presiden Rodrigo Doa Duterte Atas Kebijakan *War On Drugs*** “ oleh Mia Krisna Santi¹⁹. Jurnal ini membahas secara mendalam bagaimana sikap idiosinkratik Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, yang mencakup kepribadian, pengalaman hidup, dan gaya kepemimpinannya, sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kebijakan kontroversial "*War On Drugs*". Sikap idiosinkratik Duterte yang temperamental, emosional, dan pragmatis, serta latar belakang masa kecil yang keras dan pengalaman panjangnya sebagai Walikota Davao dengan pendekatan tegas, membentuk keyakinannya bahwa tindakan keras dan ekstrem, termasuk pembunuhan pelaku narkoba, adalah solusi efektif untuk memberantas narkoba dan melindungi generasi penerus. Kepribadian Duterte yang *task-oriented* dan berani mengambil risiko besar membuatnya menolak kritik internasional dan informasi yang bertentangan dengan keyakinannya, sehingga kebijakan yang diambil sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang pragmatis dan ambisius. Sikap

¹⁹ Ni Made Mia Krisna Santi et al., “Analisis Model Idiosinkratik Presiden Rodrigo Roa Duterte Atas Kebijakan *War On Drugs* Di Filipina” 3, no. 1 (2023): 58–69.

idiosinkratik ini menjadikan Duterte sebagai pemimpin yang tidak hanya fokus pada hasil akhir berupa penurunan angka kriminalitas, tetapi juga bersikap keras kepala dalam mempertahankan kebijakan yang kontroversial meskipun menghadapi tekanan dari komunitas internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, jurnal ini menegaskan bahwa sikap idiosinkratik Duterte yang merupakan perpaduan antara pengalaman pribadi, kepribadian yang kuat, dan gaya kepemimpinan yang tegas merupakan faktor utama yang membentuk dan mengarahkan kebijakan "War On Drugs" yang penuh kontroversi tersebut.

Tabel 1. 1 Tabel Posisi Penelitian

No.	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil
1.	<i>Bloodied Democracy: Duterte and the Death of Liberal Reformism in the Philippines</i> oleh Mark R. Thompson	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Rodrigo Duterte menandai pergeseran signifikan dari reformisme liberal menuju rezim populis illiberal di Filipina, dengan pendekatan keras dan otoriter terutama dalam kampanye anti-narkoba yang kontroversial dan ekstrapudisial. Faktor idiosinkratik Duterte, seperti gaya kepemimpinan yang pragmatis, agresif, dan personalistik, sangat mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusannya,

			<p>memungkinkan ia mengabaikan norma demokrasi dan supremasi hukum serta membangun koalisi dengan aparat keamanan dan kelompok politik strategis. Sikap unik ini menjadi kunci dalam membentuk rezim yang menekankan kekuasaan kuat dan penggunaan kekerasan sebagai alat pemerintahan, sekaligus mengikis institusi demokrasi dan prinsip hak asasi manusia di Filipina.</p>
2.	<p>“Strategi Framing Duterte terhadap kebijakan War On Drugs tahun 2016-2022” oleh Muhammad Hafizh Qhoreiq Al Asy’ Ari</p>	Kualitatif deskriptif	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi framing yang digunakan Rodrigo Duterte dalam kebijakan War On Drugs berhasil membentuk dukungan publik dengan menonjolkan penurunan kriminalitas dan narkoba, meskipun kebijakan tersebut menuai kritik keras terkait pelanggaran HAM dan tindakan kekerasan aparat. Sikap idiosinkratik Duterte yang otoriter dan tegas sangat memengaruhi pengambilan keputusan, di mana ia menolak intervensi internasional seperti dari ICC dan tetap melanjutkan kebijakan kerasnya tanpa kompromi. Sikap ini menjadi faktor utama yang</p>

			memperkuat kebijakan tersebut sekaligus menjadi sumber kritik dari masyarakat domestik maupun internasional karena dianggap mengabaikan aspek HAM.
3.	“ <i>The Presistence of Ethnopolulist Support : the Case of Rodrigo Duterte’s Philippines</i> “ oleh Dean Dually	Kualitatif deskriptif	Penelitian ini menemukan bahwa dukungan kuat dan stabil terhadap Presiden Duterte terutama didorong oleh faktor etnopolulisme, yaitu perpaduan antara identitas etnis non-Tagalog (terutama suku Bisaya) dan retorika populisnya, yang menjadi faktor utama dibandingkan demografi lain seperti usia atau pendidikan. Sikap idiosinkratik Duterte yang blak-blakan, anti-elit, dan berakar pada identitas etnis memperkuat loyalitas pendukungnya dan memengaruhi kebijakan yang diambil, termasuk kebijakan kontroversial seperti perang melawan narkoba. Namun, sikap ini juga mendapat kritik karena kebijakan tersebut sering dianggap tidak konsisten dengan retorika anti-elitnya, misalnya dengan fokus pada penindakan pengguna dan pengedar kecil sementara pelaku besar sering lolos, serta adanya praktik

			favoritisme dan klienelisme yang bertentangan dengan janji perubahan radikal.
4.	<p>“Faktor Idiosinkratik Rodrigo Duterte dalam Kebijakan Keluarnya Filipina dari <i>International Criminal Court</i> “ oleh Mochamad Agung Perkasa</p>	Kualitatif deskriptif	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor idiosinkratik Rodrigo Duterte, yang meliputi sifat ekspansionis, nasionalisme tinggi, dan ketidakpercayaan terhadap yurisdiksi internasional seperti ICC, sangat mempengaruhi kebijakan Filipina untuk keluar dari ICC sebagai respons terhadap penyelidikan atas kebijakan <i>War On Drugs</i> yang kontroversial. Sikap keras dan kepercayaan diri Duterte membuatnya tetap teguh menghadapi kritik internasional dan domestik, meskipun kebijakan tersebut menuai kecaman luas terkait pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, karakter pribadi Duterte menjadi faktor kunci dalam pengambilan keputusan politik yang kontroversial ini.</p>
5.	<p>“ <i>Understanding Dutertismo: Populism and Democratic Politics in the Philippines</i> “ oleh Ian Clark R Parcon</p>	Kualitatif deskriptif	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Rodrigo Duterte, yang dikenal dengan istilah "Dutertismo," sangat dipengaruhi oleh sikap idiosinkratiknya yang keras, konfrontatif, dan otoriter, yang mendorong pengambilan keputusan</p>

			<p>secara cepat dan tegas tanpa melalui proses deliberatif yang biasa dalam demokrasi. Sikap ini tercermin dalam kebijakan perang melawan narkoba yang represif dan kontroversial, yang meskipun mendapat dukungan lokal sebagai upaya melawan kekerasan struktural dan elitisme, juga menuai kritik luas terkait pelanggaran hak asasi manusia dan ancaman terhadap institusi demokrasi. Duterte dianggap sebagai figur yang memanfaatkan budaya politik Filipina yang menerima otoritarianisme dan mengutamakan kekuasaan pribadi, sehingga kebijakannya lebih didasarkan pada insting dan keberanian pribadi daripada mekanisme politik yang inklusif dan rasional.</p>
6.	<p><i>“ Two Faces of Duterteismo: Two Visions of Democracy in the Philippines”</i> oleh Benjiemen A. Labastin</p>	Kualitatif deskriptif	<p>Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa sikap idiosinkratik Rodrigo Duterte—yang menggabungkan retorika emosional, pendekatan populis, dan penekanan pada konflik sosial serta ketidakadilan regional berperan penting dalam</p>

			<p>pengambilan keputusan kebijakan, terutama dalam kebijakan <i>War On Drugs</i>. Sikap ini dianggap sebagai bentuk politik radikal yang menolak konsensus sempurna dan menerima konflik sosial sebagai bagian dari demokrasi, sehingga Duterte menggunakan ketegangan sosial untuk mendapatkan dukungan rakyat dan mengambil tindakan keras yang kontroversial. Namun, sikap tersebut juga mendapat kritik sebagai bentuk otoritarianisme yang mengabaikan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, di mana Duterte menggunakan kekuasaan secara represif dan mengintimidasi lawan politiknya, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran demokrasi. Dengan demikian, sikap idiosinkratik Duterte menjadi faktor kunci yang mempengaruhi kebijakan dan sekaligus menjadi sumber kontroversi dan kritik tajam.</p>
7.	<i>Political constructions of people who use</i>	Kualitatif deskriptif	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama masa</p>

	<p><i>drugs in the Philippines: A qualitative content analysis”</i> Oleh Gideon Lasco</p>	<p>kepemimpinan Rodrigo Duterte, pemerintah Filipina secara konsisten menggambarkan pengguna narkoba dalam dokumen resmi sebagai ancaman sosial dan pelaku kriminal, dengan mengabaikan hak asasi dan agensi individu. Sikap idiosinkratik Duterte yang keras, intoleran, dan penuh moral panic terhadap narkoba sangat mempengaruhi kebijakan "War On Drugs" yang represif dan punitif, menekankan penindakan keras termasuk tindakan ekstrapudisial tanpa mempertimbangkan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Kritik umum terhadap sikap Duterte menyoroti bagaimana pandangan pribadinya yang stigmatisasi dan kriminalisasi memperkuat narasi negatif terhadap pengguna narkoba, menghambat kebijakan yang lebih manusiawi dan progresif, serta menimbulkan pelanggaran hak asasi dan kekerasan yang meluas. Dengan demikian, faktor idiosinkratik Duterte menjadi kunci dalam membentuk arah dan</p>
--	---	---

			<p>karakter kebijakan narkoba yang kontroversial dan represif di Filipina.</p>
8.	<p>Analisis Model Idiosinkratik Presiden Rodrigo Doa Duterte Atas Kebijakan <i>War On Drugs</i> “ oleh Mia Krisna Santi</p>	<p>Kualitatif deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap idiosinkratik Presiden Rodrigo Duterte, yang meliputi kepribadian, pengalaman hidup, dan gaya kepemimpinannya yang pragmatis serta task-oriented, sangat mempengaruhi kebijakan "<i>War On Drugs</i>" yang diambilnya. Duterte memiliki tekad kuat untuk memberantas narkoba dalam waktu singkat dengan cara yang keras, termasuk menembak mati pelaku narkoba, yang didasari oleh keyakinan dan pengalaman masa lalunya sebagai Walikota Davao. Sikap ini membuatnya mengabaikan kritik internasional dan nilai-nilai hak asasi manusia, sehingga kebijakan tersebut sangat kontroversial dan mendapat banyak kecaman. Dengan demikian, faktor idiosinkratik Duterte menjadi kunci dalam memahami keputusan dan pendekatan kerasnya dalam kebijakan tersebut, sekaligus menjadi sumber</p>

			utama kritik terhadap pelanggaran HAM yang terjadi.
--	--	--	---

1.5 Teori Konsep

1.5.1 Konsep Idiosinkretik

Faktor Idiosinkratik dapat di artikan sebagai segala hal yang melekat pada aktor dalam konteks ini sendiri yakni pemimpin, yang kemudian dapat mempengaruhi pola pikir, persepsi pada suatu hal serta cara pandang dalam memandang suatu permasalahan yang sedang ada. Dalam ilmu Hubungan Internasional sendiri faktor idiosinkratik sendiri di kenal sebagai terimonologi *Level of analysis*, yang di sebut juga sebagai alat analisa dalam melihat dan membahas sebuah kasus dan isu dalam hubungan internasional. Alat analisa ini sendiri di mulai dari yang paling kecil, yakni faktor individu yang kemudian bergerak ke faktor atau unit analisa yang lebih besar lagi seperti masyarakat, negara kemudian sistem internasional. Dari *Level of analysis* tersebut dapat di amati bahwa faktor idiosinkratik dari seorang individu merupakan level analisa yang paling dasar, meskipun merupakan analisa paling dasar faktor individu atau idiosinkratik ini sendiri memiliki peran yang sangat penting dan fundamental²⁰.

Idiosinkretik sendiri merupakan penggabungan dari 2 kata yakni *Ideology* dan *Syncretic*²¹. Faktor idiosinkratik, juga dikenal sebagai persepsi elit, merujuk pada hal-hal yang melekat pada seorang pemimpin yang mempengaruhi pola pikir,

²⁰ Putu Sastra Wingarta, "Faktor Idiosinkratik Pemimpin Dalam Perumusan Politik Luar Negeri," *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, no. January (2016) Hal: 9-10

²¹ Arihito. dkk., *Op. Cit*

persepsi, dan cara pandang dalam melihat suatu permasalahan serta pengambilan keputusan. Dalam konteks hubungan internasional, faktor ini menjadi salah satu alat analisis untuk membedah kasus-kasus dalam hubungan internasional. Faktor idiosinkratik mencakup beberapa komponen, antara lain latar belakang keluarga (status sosial dan ekonomi keluarga), latar belakang pendidikan, pengalaman hidup, afiliasi elit, serta produksi pengetahuan. Faktor ini memainkan peran dalam proses formulasi politik luar negeri, meskipun tidak berdiri sendiri dan dapat dipengaruhi oleh faktor lain. Dalam beberapa kasus, faktor idiosinkratik bisa menjadi dominan, tetapi tidak dapat mengabaikan faktor lainnya. Faktor idiosinkratik juga menjadi bahan kajian dalam studi hubungan internasional karena pengaruhnya yang signifikan dalam formulasi kebijakan luar negeri suatu negara. Hal ini merujuk pada kemunculan banyak pemimpin negara yang sangat menentukan corak dan warna politik luar negeri negaranya. Dalam studi kasus, seperti yang terjadi pada Ahmadinejad di Iran dan Soekarno di Indonesia, faktor idiosinkratik pemimpin terbukti memainkan peranan besar dalam pencapaian kepentingan nasional²².

Istilah "idiosinkratik" merujuk pada faktor-faktor unik atau individual yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam konteks kebijakan luar negeri, faktor-faktor ini dapat mencakup nilai-nilai pribadi, pengalaman, dan karakteristik dari para pengambil keputusan yang membedakan pilihan atau perilaku mereka dari orang lain. Sumber-sumber idiosinkratik ini berbeda dengan variabel yang lebih umum atau berbasis peran yang mungkin mempengaruhi

²² Wingarta. *Op. Cit.* Hal : 6 - 14.

pengambilan keputusan dengan cara yang lebih seragam di berbagai individu atau konteks. Dengan kata lain, idiosinkratik menyoroti bagaimana elemen-elemen personal dan unik dari individu dapat mempengaruhi cara mereka membuat keputusan, terutama dalam situasi yang kompleks dan dinamis seperti politik internasional²³.

Menurut Margaret G. Hermann, ada beberapa karakteristik idiosinkratik yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan seorang pemimpin dalam kebijakan luar negeri²⁴. Hermann mengidentifikasi beberapa indikator utama yang dapat digunakan untuk menganalisis kepribadian seorang pemimpin, yaitu :

1. *Nationalism*

Nasionalisme adalah sebuah pandangan dunia di mana bangsa sendiri ditempatkan sebagai pusat perhatian utama, dengan ikatan emosional yang kuat terhadap identitas dan kehormatan nasional. Nasionalisme menekankan pentingnya mempertahankan kedaulatan negara serta superioritas bangsa sebagai tujuan utama dalam kebijakan dan tindakan politik. Dalam konteks ini, nasionalisme bukan hanya sekadar rasa cinta tanah air, tetapi juga mencakup keyakinan bahwa bangsa harus mampu mengontrol dan menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. Sikap ini sering kali membuat pemimpin yang nasionalis menempatkan kepentingan dan kehormatan bangsanya di atas segala hal, termasuk dalam menghadapi kritik atau tekanan dari negara lain atau organisasi internasional.

²³ James N. Rosenau, "The Study of World Politics," n.d. Hal 68-69

²⁴ Margaret G. Hermann, "Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders," *International Studies Quarterly* 24, no. 1 (1980): 7, <https://doi.org/10.2307/2600126>.

Dalam praktiknya, nasionalisme dapat mempengaruhi cara seorang pemimpin merespon kritik asing. Pemimpin yang memiliki pandangan nasionalis cenderung bersikap defensif terhadap kritik yang dianggap mengancam kedaulatan atau merendahkan martabat bangsa. Sikap ini tercermin dalam respon Rodrigo Duterte terhadap kritik Uni Eropa atas kebijakan "*War On Drugs*" di Filipina. Duterte menolak campur tangan Uni Eropa dan kritik yang diarahkan kepadanya, dengan menegaskan bahwa kebijakan tersebut adalah urusan dalam negeri Filipina yang harus dihormati oleh negara lain. Ia menempatkan kedaulatan nasional sebagai prioritas utama dan menolak segala bentuk tekanan yang dianggap mengganggu hak Filipina untuk menentukan kebijakan sendiri. Respon Duterte ini menunjukkan karakteristik nasionalisme yang kuat, di mana identitas dan kehormatan nasional dijaga dengan ketat, dan intervensi asing dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara.

Dengan demikian, nasionalisme dalam konteks ini bukan hanya soal kebanggaan terhadap bangsa, tetapi juga merupakan landasan bagi pemimpin seperti Duterte untuk mempertahankan otoritas dan kebijakan domestik tanpa terganggu oleh kritik atau tekanan dari aktor internasional. Sikap ini mencerminkan bagaimana nasionalisme dapat menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan luar negeri dan respons terhadap kritik global.²⁵

²⁵ *Ibid*, Hal 19-20

2. *Distrust Of Others*

Distrust of others adalah sikap atau pandangan di mana seorang pemimpin atau negara cenderung curiga terhadap motif dan niat negara lain. Sikap ini membuat mereka sulit mempercayai kepemimpinan atau kebijakan negara lain, sehingga lebih memilih untuk bertindak secara independen dan mengutamakan kepentingan nasional tanpa terlalu mengandalkan atau bekerja sama dengan pihak luar. Pemimpin yang memiliki tingkat *distrust of others* yang tinggi biasanya ingin menjaga kedaulatan dan otonomi negaranya dengan ketat, menghindari ketergantungan, dan sering kali menolak campur tangan asing dalam urusan dalam negeri mereka.

Dalam konteks kebijakan "*War On Drugs*" yang diterapkan oleh Rodrigo Duterte di Filipina, sikap *distrust of others* sangat relevan. Duterte menunjukkan ketidakpercayaan yang kuat terhadap kritik dari Uni Eropa dan aktor internasional lainnya yang menentang metode kerasnya dalam memberantas narkoba. Ia menolak intervensi dan kritik tersebut dengan alasan bahwa kebijakan tersebut adalah urusan dalam negeri Filipina yang harus dihormati oleh negara lain. Sikap ini mencerminkan *distrust of others* karena Duterte tidak mempercayai motif atau niat Uni Eropa dalam mengkritik kebijakannya, dan lebih memilih untuk mempertahankan kontrol penuh atas kebijakan domestiknya tanpa pengaruh eksternal²⁶.

Sikap *distrust of others* ini memperkuat posisi Duterte dalam menegaskan kedaulatan Filipina. *distrust of others* membuatnya skeptis terhadap campur

²⁶ Ibid.

tangan asing, sehingga ia cenderung menolak kritik dan tekanan dari luar yang dianggap merugikan atau mengancam kedaulatan negara. Dengan demikian, sikap Duterte dalam menghadapi kritik Uni Eropa bukan hanya soal kebijakan narkoba, tetapi juga merupakan manifestasi dari orientasi personalnya yang menekankan kemandirian, kontrol nasional, dan ketidakpercayaan terhadap aktor luar. Dengan begitu *distrust of others* merupakan elemen penting dalam memahami bagaimana Duterte merespon kritik internasional, di mana ia mengutamakan kedaulatan dan otonomi Filipina dengan menolak campur tangan asing, yang sekaligus memperkuat nasionalisme dalam kebijakan luar negerinya.

3. ***High Need For Power***

High need for power adalah dorongan kuat seorang pemimpin untuk mengendalikan, mempengaruhi, dan memiliki otoritas atas orang lain serta peristiwa di sekitarnya. Pemimpin dengan kebutuhan kekuasaan yang tinggi cenderung ingin menunjukkan dominasi dan kontrol penuh dalam pengambilan keputusan, terutama dalam konteks kebijakan yang dianggap penting bagi negara atau identitas nasionalnya. Mereka biasanya percaya bahwa mereka mampu mengarahkan jalannya peristiwa sesuai dengan kehendak mereka dan tidak segan menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam kasus Rodrigo Duterte, kebutuhan kekuasaan yang tinggi sangat terlihat dalam kebijakan "*War On Drugs*"-nya. Duterte mengambil pendekatan yang sangat keras dan otoriter dalam memberantas narkoba, menunjukkan keinginan kuat untuk mengendalikan situasi dalam negeri dan menegaskan

otoritasnya sebagai pemimpin yang tidak bisa diganggu gugat. Sikapnya yang menolak kritik dari Uni Eropa dan aktor internasional lainnya juga mencerminkan keyakinannya bahwa ia memiliki hak penuh dan kemampuan untuk menentukan kebijakan dalam negeri tanpa campur tangan luar. Hal ini menunjukkan bahwa Duterte tidak hanya berusaha mempertahankan kedaulatan nasional, tetapi juga menegaskan kekuasaannya secara pribadi dalam mengelola isu-isu penting negara.

High need for power pada Duterte memperkuat sikap nasionalisme dan distrust of others-nya, yang membuatnya bersikap tegas dan defensif terhadap kritik asing serta berusaha mempertahankan kontrol penuh atas kebijakan domestik Filipina. Sikap ini konsisten dengan karakteristik pemimpin yang memiliki kebutuhan kekuasaan tinggi dalam orientasi kebijakan luar negerinya.²⁷

4. *Belief in One's Ability to Control Event*

Belief in one's own ability to control events adalah keyakinan mendalam seorang pemimpin bahwa dirinya mampu mempengaruhi, mengarahkan, dan mengendalikan peristiwa-peristiwa politik dan kebijakan yang terjadi, baik di tingkat domestik maupun internasional. Pemimpin dengan keyakinan ini merasa bahwa mereka memiliki kapasitas dan otoritas untuk menentukan arah jalannya peristiwa sesuai dengan kehendak dan strategi mereka sendiri. Keyakinan ini sangat penting dalam membentuk *operational code* seorang

²⁷ *Ibid*, Hal 23-24

pemimpin, yaitu seperangkat aturan dasar yang di gunakan untuk memahami dan bertindak dalam dunia politik

Pemimpin yang memiliki *belief in one's own ability to control events* cenderung lebih percaya diri dalam mengambil keputusan strategis dan bertindak secara proaktif. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh faktor eksternal yang dianggap menghambat, dan lebih yakin bahwa mereka dapat mengatasi hambatan tersebut melalui tindakan mereka sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan orientasi kepemimpinan yang independen, di mana pemimpin merasa bahwa mereka harus mengendalikan situasi tanpa terlalu bergantung pada aktor lain atau campur tangan asing

Dalam konteks Rodrigo Duterte, *belief in his own ability to control events* sangat jelas terlihat dalam kebijakan "*War On Drugs*". Duterte yakin bahwa dirinya mampu mengatasi masalah narkoba yang dianggap sebagai ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas Filipina. Meskipun kebijakan tersebut menuai kritik keras dari komunitas internasional, termasuk Uni Eropa²⁸., Duterte tetap bersikeras bahwa ia memiliki otoritas penuh untuk menentukan kebijakan dalam negeri tanpa campur tangan asing. Sikap ini menunjukkan keyakinannya bahwa ia mampu mengendalikan situasi domestik dan menegaskan kedaulatan nasional Filipina.

Keyakinan Duterte ini juga memperkuat orientasi independennya dalam kebijakan luar negeri, di mana ia menolak intervensi atau tekanan dari negara lain dan lebih memilih pendekatan yang tegas dan otoriter dalam mengelola

²⁸ *Ibid*, Hal 3-4

isu-isu penting negara. Dengan sikap *belief in one's own ability to control events*, Duterte menunjukkan bahwa ia tidak hanya melihat dirinya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas nasib bangsanya, tetapi juga sebagai aktor utama yang mampu mengendalikan dan mengarahkan peristiwa politik sesuai dengan visi dan strateginya sendiri.

Dengan demikian *belief in one's own ability to control events* merupakan salah satu karakteristik personal yang sangat menentukan gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan Duterte, terutama dalam konteks kebijakan yang kontroversial dan penuh risiko seperti perang melawan narkoba. Keyakinan ini memungkinkan Duterte untuk bertindak dengan tegas dan percaya diri, meskipun menghadapi tekanan dan kritik dari berbagai pihak²⁹.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada Penelitian ini, penulis memilih salah satu metode penelitian yakni deskriptif, penelitian deskriptif ini di pilih untuk menjelaskan bagaimana respon Rodrigo Roa Duterte terhadap kritik Uni Eropa atas kebijakan *War On Drugs* di Filipina. Penelitian model deskriptif sendiri di gunakan untuk dapat menggambarkan fenomena atau peristiwa secara sistematis serta factual. Hal ini tentu melibatkan pengumpulan data yang rinci serta di perlukan analisis data secara mendalam untuk pada akhirnya dapat memahami fenomena dan konteks yang akan di bahas

²⁹ *Ibid, Hal. 17*

1.6.2 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini sendiri penulis akan menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini sendiri nantinya akan menggunakan cara yang dapat memaparkan banyak aspek seperti pengumpulan data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan atas data dan penelitian yang telah di lakukan sebelumnya. Dengan begitu, penulis berusaha untuk melakukan pengumpulan sumber informasi yang tentunya relevan dengan penelitian yang akan di tulis nantinya, yakni mencakup materi yang di bahas dan isu isu yang masih memiliki keterkaitan dengan judul penelitian dan tahun yang relevan. Data data tersebut tentunya harus mengandung data kualitatif dari berbagai sumber seperti artikel ilmiah, portal berita online dan sumber sumber lain yang memiliki tujuan untuk mendukung analisis dan konsep dalam riset

1.6.3 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan riset Pustaka atau bisa di sebut dengan *Library Research*. Teknik ini sedniri mengharuskan penulis untuk melakukan pengumpulan bahan referensi yang relevan dengan judul atau isu yang di bahas oleh penulis, pengumpuland data tersebut dapat di ambil melalui berbagai sumber referensi yang relevan, seperti buku, jurnal penelitian, portal berita online yang relevan dengan isu yang di bahas oleh penulis. Sumber sumber referensi tersebut tentunya harus melalui klasifikasi lebih lanjut seperti pengecekan data yang di sajikan pada sumber tersebut harus memiliki kredibilitas yang jelas dan datanya dapat di pastikan bukan merupakan sebuah opini publik yang di

unggah melalui website seperti blogspot.com atau sumber sumber yang tidak kredibel lainnya. Data yang di ambil melalui penelitian tersebut di ambil atau di unduh melalui bantuan mesin pencarian seperti *Google Scholar*, *Publish Or Perish* dan lain sebagainya.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan Materi

Dalam sebuah penelitian tentu saja harus menyertakan Batasan materi yang memiliki tujuan agar pada sebuah penelitian tidak meluas dan membahas pembahasan yang meluas terlalu jauh serta agar tetap fokus ke dalam tujuan awal penelitian. Maka penelitian ini sendiri hanya akan membahas bagaimana faktor idiosikratik presiden Rodrigo Duterte terhadap kritik Uni Eropa atas kebijakan *War On Drugs* di Filipina

1.6.4.2 Batasan Waktu

Pada penelitian ini penulis akan menetapkan Batasan waktu supaua pembahasan pada penelitian ini tidak meluas ke taun tahun yang tidak semestinya di maksudkan untuk di bahas oleh penulis, oleh karena itu penelitian ini akan berfokus pada tahun awal di lantiknya presiden Rodrigo Duterte 2017 hingga 2020. Dimana pada rentan periode tahun tersebut hubungan Filipina dan Uni Eropa sempat mengalami ketegangan akibat kebijakan *War On Drugs* yang di implementasikan oleh Duterte dalam usahanya memerangi narkotika di Filipina.

1.7 Argumen Pokok

Respons Rodrigo Duterte terhadap kritik Uni Eropa atas kebijakan *War On Drugs* tidak semata-mata merupakan cerminan kepentingan nasional Filipina, tetapi sangat dipengaruhi oleh kepribadian dan gaya kepemimpinannya yang bersifat idiosinkratik. Untuk menjelaskan fenomena ini, digunakan teori idiosinkratik dari Margaret Hermann, yang menekankan bahwa pemimpin dengan karakteristik tertentu dapat membentuk arah kebijakan luar negeri berdasarkan persepsi dan gaya personalnya, bukan institusi semata. Dalam konteks Duterte, keempat indikator utama yakni *nationalism*, *distrust of others*, *need for power*, dan *belief in ability to control event* tampak jelas dalam cara Duterte merespons tekanan asing, khususnya dari Uni Eropa. Nasionalismenya mendorong penolakan terhadap kritik sebagai bentuk intervensi asing. *Distrust* menumbuhkan kecurigaan terhadap motif Eropa. *Need for power* memperlihatkan keinginannya untuk memegang kendali penuh, dan *belief in control* mencerminkan keyakinan bahwa hanya ia yang mampu menyelesaikan masalah narkoba di Filipina. Keempat elemen ini saling memperkuat dan melahirkan sikap xenofobik, yang diekspresikan melalui berbagai gestur simbolik seperti mengacungkan jari tengah, penarikan Filipina dari ICC, dan pernyataan bahwa diplomat Uni Eropa harus keluar dari negaranya. Semua ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Duterte, termasuk respons atas kritik HAM internasional, sangat dipengaruhi oleh faktor kepribadian yang bersifat idiosinkratik, bukan hanya oleh tekanan struktural atau institusional semata.

1.8 Sistematika Penulisan

<p style="text-align: center;">BAB I PENDAHULUAN</p>	<p>1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.3.2.1 Manfaat Akademis 1.3.2.2 Manfaat Praktis 1.3 Peneliti Terdahulu 1.4 Teori Konsep 1.4.1 Konsep Idiosinkratik 1.5 Metode penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Metode Analisis Data 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 1.6.4.1 Batasan Materi 1.6.4.2 Batasan Waktu 1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika Penelitian</p>
<p style="text-align: center;">BAB II RODRIGO DUTERTE DIANTARA KEBIJAKAN <i>WAR ON DRUGS</i> DAN KETEGANGAN DENGAN UNI EROPA</p>	<p>2.1 Dinamika Kepemimpinan Rodrigo Duterte 2.1.1 Kebijakan <i>War On Drugs</i> 2.1.2 Pelanggaran HAM Atas Kebijakan <i>War On Drugs</i> 2.2 Ketegangan Antara Filipina dan Uni Eropa 2.2.1 Keluarnya Filipina dari ICC 2.2.2 Dampak Kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte Terhadap Hubungan Uni Eropa 2.2.3 Respon Keras Duterte terhadap Uni Eropa 2.2.4 Kondisi Hubungan Filipina dan Uni Eropa</p>
<p style="text-align: center;">BAB III PERJALANAN KEHIDUPAN DAN KARIR POLITIK DUTERTE</p>	<p>3.1 Kehidupan Awal Keluarga Rodrigo Duterte 3.2 Karir Pendidikan Rodrigo Duterte 3.3 Rodrigo Duterte dan Berkembangnya Kota Davao 3.4 Jalan Menuju Kursi Kepresidenan Filipina 3.4.1 Kandidasi Rodrigo Duterte</p>

	3.4.2 Upaya Kampanye Rodrigo Duterte Jelang Pemilu
BAB IV ANALISIS FAKTOR IDIOSINKRATIK	4.1 Duterte dan latar belakang nasionalisme 4.2 <i>Trust Issue</i> Duterte dengan barat 4.3 Orientasi kekuasaan Duterte 4.4 Dominasi dan Hak atas Kontrol terhadap situasi
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	5.1 Kesimpulan 5.2 Saran

